



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KH. ABDURRAHMAN WAHID, NEGARA DAN KEBIJAKAN NON-DISKRIMINASI; STUDI TERHADAP KEBIJAKAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

SKRIPSI



**IYUM JUMANAH NASHIR
NIM. 07110008**

**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAKWAH USHULUDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
2012 M / 1433 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK/IKHTISAR

Iyum Jumanah Nashir. NIM 07110008. **“KH. ABDURRAHMAN WAHID, NEGARA DAN KEBIJAKAN NON-DISKRIMINASI; STUDI TERHADAP KEBIJAKAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA”**. Skripsi. Cirebon: Fakultas Adab Dakwah Ushuludin, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam Negeri, Mei 2012

Penelitian ini bertolak dari fenomena adanya tindakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, yang mana etnis Tionghoa dibatasi ruang gerakannya. Contohnya dalam berbagai bidang kehidupan seperti adat istiadat, tradisi, serta agama Khonghucu yang masih dipandang sebelah mata. Ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden, beliau mengeluarkan peraturan non diskriminasi bahwa etnis Tionghoa boleh memiliki ruang gerak terutama menyangkut tentang ke Tionghoan. Peraturan peraturan diskriminasi etnis Tionghoa mulai ditinjau kembali. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui latarbelakang di buatnya inpres tersebut tentang adat istiadat, tradisi, serta agama Khonghucu. Hal tersebut menunjukkan masih adanya prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa. Dengan adanya peraturan yang dibuat Gus Dur secara perlahan etnis Tionghoa mulai memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriftif yaitu melakukan wawancara dengan salah satu tokoh etnis Tionghoa guna mengetahui dampak dari dibuatnya kebijakan Gus Dur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa etnis Tionghoa mulai mengalami perubahan terutama setelah dibentuknya kebijakan Gus Dur dengan mengeluarkan Inpres no. 6/2000 tentang pencabutan Inpres no.14/1966 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Dengan ini, kegiatan keagamaan, adat istiadat, serta kepercayaan bisa dilaksanakan secara publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK/IKHTISAR

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika penulisan	14

BAB II KONDISI ETNIS TIONGHOA SEBELUM DIBERLAKUKANNYA

KEBIJAKAN GUS DUR

A. Asal Usul Istilah Tionghoa	15
B. Sejarah Awal Kedatangan Etnis Tionghoa ke Indonesia.....	16
C. Perkembangan Etnis Tionghoa di Indonesia	20
D. Kondisi Etnis Tionghoa Sebelum Kebijakan Gus Dur	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

a.Masa Kolonial	21
b.Masa Orde Lama	23
c.Masa Orde Baru	24
d.Tionghoa Pasca Orde Baru.....	26
E. Kerusuhan Anti Tionghoa Sebagai Akibat Kebijakan Orde Baru.....	29

BAB III KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DAN KOMUNITAS TIONGHOA

A. Biografi Gus Dur	31
a.Pandangan-Pandangan Gus Dur.....	35
b.Gus Dur Sebagai Penyeru Pluralisme	36
c.Pandangan Gus Dur Terhadap Demokrasi.....	38
d.Gus Dur Sebagai Pembela Kaum Minoritas	40
e.Pandangan Gus Dur Tentang Konsep Bangsa Indonesia.....	42
B. Peranan Gus Dur Dalam Eksistensi Agama Konghucu di Indonesia.....	43
C. Gus Dur Sebagai Presiden.....	45

BAB IV KEBIJAKAN NON DISKRIMINASI DAN IMPLIKASINYA

A. Proses yang Melatarbelakangi Adanya Kebijakan Pemerintah Terhadap Etnis Tionghoa	47
B. Peraturan-Peraturan tentang Asimilasi Terhadap Etnis Tionghoa	49
C. Implikasinya	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Saran	62
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Inpres No. 67 Tahun 1958
2. Inpres No. 127 Tahun 1966
3. Inpres No. 6 Tahun 2000
4. Rekap Hasil Wawancara
 - a. Pak Satibi
 - b. Pak Iyan
 - c. Pak Yudi
 - d. Pak Mustakim



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan karena dengan rahmat dan hidayah-nya, skripsi ini dapat selesai. Begitu banyak tantangan dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “***KH. ABDURRAHMAN WAHID, NEGARA DAN KEBIJAKAN NON-DISKRIMINASI; STUDI TERHADAP KEBIJAKAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA***” ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya selesai juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis sampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan.

1. Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, MA, Rektor IAIN SYEKH NURJATI Cirebon.
2. Dr. H. Adib. M.Ag, Dekan Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN SYEKH NURJATI Cirebon.
3. Dedeh Nur Hamidah M.Ag, Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN SYEKH NURJATI Cirebon.
4. Zaenal Masduqi M.Ag, sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN SYEKH NURJATI Cirebon.
5. Didin Nurul Rosidin, S.Ag, MA, Ph.D, Dosen Pembimbing I dan Ibu Dedeh Nur Hamidah M.Ag, Dosen Pembimbing II.
6. Rekan-rekan Jurusan Sejarah Peradaban Islam yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah Bapak / Ibu,
Saudara/I berikan kepada penulis, baik arahan, bimbingan dan motivasi kepada
penulis.

Cirebon, Januari 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 23 Juli 1995 terjadi peristiwa kontroversial perkara Budi dan Lanny yang menikah dengan tata cara agama Konghucu di Surabaya. Dalam peraturan hukum Indonesia, selain muslim, warga negara Indonesia yang beragama lain diwajibkan mencatat pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Namun ketika pasangan Buddi dan Lanny ingin mencatat perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, permohonan mereka ditolak karena mereka beragama Konghucu yang tidak termasuk agama resmi di Indonesia kecuali mereka yang mengubah agamanya menjadi agama Buddha yang merupakan salah satu agama resmi di samping Islam, Hindu, Katolik, dan Protestan. Perkara tersebut mendapatkan perhatian dari organisasi hak asasi manusia, masyarakat Tionghoa dan kaum intelektual pribumi.¹

Pengacara Budi berpendapat bahwa Konghucu adalah agama dan sebagai negara Pancasila di mana warganegaranya mempunyai kebebasan beragama, Kantor Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk menolak pendaftaran pernikahan Budi dan Lanny. Kesempatan Budi untuk memenangkan perkara tersebut sangatlah kecil jika dikaitkan dengan hukum dan struktur pemerintahan pada masa Orde Baru. Meskipun begitu banyak kaum intelektual yang mengkritik sikap pemerintah yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan

¹ Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), cetakan ke 1, hlm. 189



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

beragama. Salah satunya kritik yang dibuat KH. Abdurrahman Wahid. Ia berpendapat bahwa suatu kepercayaan adalah agama, hal itu tidak bisa ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh penganutnya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Gus Dur juga berpendapat bahwa Konghucu adalah agama, tidaklah adil kalau pemerintah menolak keberadaan agama minoritas ini.²

Awalnya pada masa Orde Baru, agama Konghucu dirangkul oleh Soeharto. Pemerintahan soeharto menganggap agama sebagai suatu kekuatan untuk mencegah munculnya kembali PKI dan gerakan sayap kiri lainnya. Namun pengakuan agama-agama minoritas bertolak belakang dengan kebijakan umum Soeharto terhadap Warga Indonesia keturunan Tionghoa³ yaitu kebijakan asimilasi yang sifatnya diskriminatif,⁴ yaitu dengan dibentuknya Inpres No. 14/1966 yang berisi tentang larangan melaksanakan adat-istiadat, agama, serta kebudayaannya. Ini berarti pemerintah membatasi ruang gerak etnis Tionghoa untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya.

Dengan tumbanganya Soeharto, Indonesia menjadi lebih demokratis. Peraturan-peraturan yang diskriminatif rasial mulai ditinjau kembali. Keadaan berubah ketika tahun 1998 Menteri Agama yang baru, Prof. Malik Fajar mengumumkan bahwa pemerintah kini telah mengakui Konghucu sebagai salah satu agama yang resmi yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5/1969

² *Ibid*, hlm . 180-190

³ Dalam Skripsi ini saya menggunakan istilah Tionghoa untuk menyebut orang Tionghoa keturunan Cina karena istilah Tionghoa lebih halus dibandingkan dengan Cina yang mengandung arti ejekan. Tetapi untuk menyebut negaranya saya menggunakan kata Cina.

⁴ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1986), cetakan ke 2, hlm. 169-170



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

telah menerima Konghucu sebagai salah satu agama.⁵ Namun pengakuan agama tersebut belum diakui secara sah karena belum mendapat pengakuan dari MPR. Ketika Gus Dur menjadi Presiden, kebijakan anti diskriminasi menemukan momentum yaitu dengan dikeluarkannya Inpres no. 6/2000 yang isinya mengenai pencabutan Inpres no. 14/1966 tentang adanya larangan etnis Tionghoa untuk menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama Konghucu.

Berbicara mengenai pluralisme⁶ tidak terlepas dari peranan Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur. Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat toleran terhadap kaum minoritas Tionghoa. Dalam hal ini etnis Tionghoa juga memiliki hak-hak yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan karena etnis Tionghoa bagian dari Warga Negara Indonesia. Suatu perjalanan panjang di mana etnis Tionghoa turut berperan dalam kebudayaan serta penyebaran Islam di Nusantara ini.

Selain terhadap etnis Tionghoa Gus Dur juga berperan terhadap eksistensi agama Konghucu yang dianut oleh etnis Tionghoa, yaitu dengan diakuinya agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Pengakuan ini memperkuat kebijakan pemerintah pada tahun 1998. Menurut Gus Dur kerukunan antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan secara damai tetapi adanya saling mengerti satu sama lain. Gus Dur berargumentasi, yang perlu dikembangkan

⁵ *Ibid*, hlm. 191

⁶ Pluralisme mungkin merupakan kebijakan budaya yang paling tepat. Dalam Pancasila disebutkan “Persatuan Indonesia” – bukan Kesatuan Indonesia – artinya bahwa keragaman itu diakui, pluralisme bukan melting pot. Pluralisme berarti bahwa semua daerah, semua tradisi, dan semua kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 17



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

adalah rasa kebersamaan dan saling mengerti di antara semua pihak dan kelompok.⁷

Negara Indonesia berpegang kepada ungkapan Empu Tantular, “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Artinya kaum muslim di Indonesia telah sepakat untuk menerima adanya negara yang bukan negara Islam.⁸ Negara Indonesia adalah negara yang multi-etnik yang mempunyai banyak perbedaan baik itu budaya, agama, dan sebagainya.

KH. Said Agil Siradj menyatakan bahwa sebenarnya pada diri tokoh Gus Dur terdapat garis keturunan Tionghoa.⁹ Meskipun begitu tidak usah diperdebatkan apakah Gus Dur itu benar-benar memiliki darah Tionghoa atau tidak. Dalam hal ini, yang penting di Indonesia adalah bahwa dalam suasana anti Tionghoa, seorang presiden berani mengakui dirinya “Keturunan Tionghoa” mempunyai arti politik luar biasa.¹⁰

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama dan jumlahnya pun cukup besar. Tetapi karena masalah etnis dianggap peka, sebelum tahun 2000, data mengenai jumlah etnis Tionghoa di Indonesia tidak pernah masuk ke dalam sensus penduduk. Jadi perkiraan mengenai Tionghoa masih didasarkan pada sensus tahun 1930 yaitu sekitar 2,03% dari jumlah penduduk Indonesia. Leo Suryadinata tahun 2000-an memperkirakan jumlah penduduk Tionghoa warga

⁷ Irwan Suhandi (Ed), *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 21

⁸ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Kekelisahan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2008), cetakan ke 3, hlm. 26

⁹ Benny G Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta : Elkasa, 2003), hlm. 32

¹⁰ Leo Suryadinata, *op. cit.*, hlm. 192



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

negara Indonesia dan warga negara Asing kira-kira sekitar 1,5-2,0% namun Persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan taksiran sensus tahun 1930. Menurunnya persentasi etnik Tionghoa mungkin disebabkan oleh tiga faktor utama: angka kelahiran yang menurun, imigrasi ke luar negeri akibat gejolak politik dan sosial, dan kebijakan asimilasi selama Orde Baru.¹¹

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan *totok*.¹² Secara ekonomi etnis Tionghoa sangat kuat, hampir semua perekonomian di Indonesia dikuasai oleh etnis Tionghoa. Salah satu kunci dari penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia tidak saja terletak pada sistem ekonomi yang adil dan merata, tetapi sama pentingnya adalah konsep bangsa Indonesia yang adil dan merata.¹³ Tanpa adanya perbedaan antara kaum minoritas dan mayoritas atau antara penduduk pribumi dan keturunan semuanya harus diberlakukan secara adil.

Suatu kenyataan kini, bahwa warga etnis Tionghoa merupakan bagian dari kebhinekaan bangsa Indonesia, suatu hasil dari perjalanan panjang dan lama. Kelompok ini turut menyumbang dalam pembentukan kebudayaan Nasional Indonesia. Misalnya dalam pembendaharaan bahasa kesusasteraan, penyebaran Agama Buddha dan Islam, produk tenunan dan batik, teknik pertukangan dan

¹¹Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.209-210

¹² Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti orang Indonesia sedangkan *totok* adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa

¹³Leo Suryadinata, *op. cit.*, hlm. 66



bangunan, arsitektur batik dalam langgam bangunan, ornamen kawasan dan lain-lainnya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Apa yang melatarbelakangi di buatnya Inpres No. 6/2000?
2. Apa isi Inpres tersebut?
3. Bagaimana implikasi dari Inpres tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan :

1. Untuk mengetahui latar belakang di buatnya Inpres tersebut.
2. Untuk mengetahui isi dari Inpres tersebut.
3. Untuk mengetahui implikasi dari Inpres tersebut.

D. Kerangka Teori

Banyak sekali definisi tentang kebijakan publik. Sebagian besar para ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang menyangkut

¹⁴Sugiri Kusteja, “Kedatangan Minoritas Tionghoa di Jawa Barat dan Perkembangannya Kota Bandung”, (Majalengka: TP, TT), hlm : 1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kehidupan masyarakat dalam sebuah negara yang memberikan perubahan terhadap warganya.¹⁵

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan bukan saja dalam arti “*Govermen*” yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *govermen* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara.¹⁶

Kebijakan berasal dari kata “*policy*” (Inggris) yang artinya kebijakan. Adapun definisi kebijakan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Lasswell dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program mencapai tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakansanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Adapun pengertian kebijakan publik menurut Mac Rae Wilde, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang-orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu sendiri dari berbagai kegiatan yang serangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan

¹⁵ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3

¹⁶ Edi Suharto, *op. cit.*, hlm. 3

¹⁷ Irfan Islamy, *Kebijakan PublikI*, (Jakarta: Karunia, 1993), hlm. 1.4



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang. Adapun Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.¹⁸

Dilihat dari partisipasi dalam kebijakan publik David Saston memandang kebijakan publik sebagai respon politik terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Pengaruh lingkungan budaya politik terhadap kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda cara pandangnya, sistem keyakinannya, gaya hidupnya dengan masyarakat lainnya.¹⁹

Pandangan masyarakat Indonesia yang selalu beranggapan negatif terhadap etnis Tionghoa menimbulkan adanya kontak sosial kurang baik di antara keduanya.²⁰ Etnis Tionghoa tidak memiliki hak-haknya sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa. Dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminasi²¹ terhadap etnis Tionghoa semakin tampak bahwa keberadaan Tionghoa di Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 1.7

¹⁹ *Ibid*, hlm, 8.1

²⁰ Prasangka berasal dari dua kata latin yakni *Prae* (sebelum) dan *Judicium* (penilaian). Kata tersebut mengandung pengertian suatu penilaian yang dinyatakan sebelum mengetahui fakta Paul B. Horton, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 65

²¹ Diskriminasi merupakan cara memperlakukan orang berdasarkan pada klasifikasi kelompok, bukannya berdasarkan cirri-ciri individu *Ibid*, hlm, 65



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber buku dari perpustakaan, toko buku, kolektor dan lain lain, Ditemukan beberapa karya terdahulu yang membahas mengenai Tionghoa, salah satunya buku *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Buku ini sangat mendukung untuk dijadikan bahan referensi dan literatur dalam penulisan skripsi ini. Sebuah karya besar dari Leo Suryadinata terbitan LP3S Jakarta. Di dalamnya terdapat satu bahasan yang secara khusus membahas materi mengenai *Tionghoa di Indonesia*. Buku-buku lain yang pernah dibahas antara lain.

Pertama, Leo Suryadinta *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Dalam penulisan skripsi buku ini menjadi rujukan dari halaman 22 tentang kondisi etnis Tionghoa di Indonesia. Cakupan buku ini meliputi tentang etnis Tionghoa untuk mencari identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia. Suatu perjalanan panjang demi diterimanya etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia. Identitas etnis Tionghoa sangat berpengaruh terhadap perkembangan etnis Tionghoa di Indonesia. Dengan dihapusnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa membuka ruang gerak etnis Tionghoa untuk mencari identitasnya.

Kedua, Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Membahas tentang persepsi kaum pribumi terhadap etnis Tionghoa sehingga persepsi tersebut berdampak terhadap politik pemerintahan Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia tidak menerima orang Tionghoa peranakan maupun totok. Tionghoa peranakan maupun totok masih dianggap Tionghoa kecuali mereka melepaskan identitasnya sepenuhnya. Karena ketidakpercayaan kaum pribumi terhadap minoritas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tionghoa, politik dalam negeri Indonesia selalu berupaya mengurangi apa yang dianggap sebagai kekuatan ekonomi, politis, dan budaya para Tionghoa lokal karena pada masa lampau orang Tionghoa melayani kepentingan penguasa kolonial (Belanda dan Jepang).

Ketiga, Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia.

Buku tersebut menceritakan tentang semangat nasionalisme Tionghoa antara tahun 1965-2008. Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan asimilasi yang diberlakukan oleh Soeharto bersifat diskriminasi. Sebelum Indonesia merdeka etnis Tionghoa terbagi dalam tiga kelompok dalam orientasi politik, namun sifat nasionalisme Indonesiannya tidak di hilangkan. Setelah Indonesia merdeka semangat nasionalisme Indonesia di kalangan Tionghoa semakin kuat. Mereka memiliki andil besar dalam pembangunan nation Indonesia yang baru. Dalam hal ini, dihapuskannya istilah pribumi dan nonpribumi

Keempat, Sumanto Al Qurtuby Arus Cina-Islam-Jawa (Bongkar Sejarah atas Peranan Etnis Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Jawa abad XV&XVI).

Dalam penulisan skripsi buku ini menjadi rujukan dari halaman 16 tentang Sejarah awal etnis Tionghoa ke Indonesia. Cakupan buku ini membahas peranan etnis Tionghoa dalam penyebaran Islam di pulau Jawa. Bahwa Islam yang berkembang di Nusantara ini berasal dari Tiongkok serta Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara sebagian adalah Tionghoa. Ada dua teori tentang jalur pengembangan Islam di Jawa yaitu teori Gujarat dan teori Arab. Nurcholish Madjid melihat kecocokan "teori Cina" itu dari segi mazhab dan kebahasaan. Mazhab yang berkembang di Cina adalah Sunni-Syafii, yang umumnya dianut kaum muslim di Nusantara. Tionghoa bukan hanya Konghucu saja tetapi ada juga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tionghoa muslim, Tionghoa muslim tenggelam akibat pelapukan sejarah. Percampuran budaya Cina-Islam-Jawa juga mempengaruhi budaya lokal di Nusantara. Jadi sebenarnya etnis Tionghoa sudah ada sekitar 2000 tahun yang lalu jauh sebelum muslim Tionghoa menyebarkan islam di pulau jawa.

Dalam buku buku tersebut belum adanya pembahasan yang signifikan tentang kebijakan nondiskriminasi Gus Dur tentang Etnis Tionghoa. Buku buku tersebut hanya menyinggung seputar keberadaan dan perkembangan etnis Tionghoa di Indonesia sedangkan kebijakan Gus Dur hanya diulas sedikit saja.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Heuristik

Heuristik adalah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Sumber tersebut terdiri dari sumber primer dan skunder. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata atau pelaku peristiwa yang pernah hidup sejaman. Sumber sekunder adalah keterangan yang di dapat dari orang yang tidak sejaman yakni berupa buku, koran, atau majalah.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Dalam hal ini, dilakukan uji tentang keabsahan tentang keaslian suatu sumber (autentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksteren dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang dilakukan



melalui kritik intern. Setelah itu kita harus melakukan pengujian tentang asli atau tidaknya dari dua sumber tersebut.

3. interpretasi

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut dianalisis, diberi makna sehingga dapat dipahami secara logis.

4. Historiografi

Fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari fase awal samapi akhir (penarikan kesimpulan).²²

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif yakni dengan menggunakan tehnik-tehnik yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dan data data yang sesuai dengan bahasan dalam skripsi. Informan dalam penelitian ini adalah :

²² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media. 2007), cetakan 2, hlm. 63-76



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- a. Pak Mustakim selaku budayawan Cirebon
- b. Pak Dr. Satibi selaku Tionghoa peranakan
- c. Pak Yudi selaku Tionghoa muslim
- d. Pak Romo selaku Tionghoa peranakan

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan oleh penulis yakni dari studi kepustakaan berupa buku buku yang terdapat di perpustakaan IAIN Cirebon, perpustakaan 400, dan beberapa kolektor buku.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibahas dalam lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang kondisi etnis Tionghoa sebelum diberlakukannya kebijakan Gus Dur yang berisi asal usul istilah Tionghoa, Sejarah awal mulanya etnis Tionghoa datang ke Indonesia, perkembangan etnis Tionghoa, kondisi etnis Tionghoa sebelum diberlakukannya kebijakan Gus Dur, dan kerusuhan etnis Tionghoa sebagai akibat kebijakan Orde Baru.

Bab ketiga Menjelaskan tentang biografi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berisi biografi Gus Dur, Pandangan-pandangan Gus Dur, dan peranan Gus Dur dalam eksistensi Tionghoa di Indonesia, Gus Dur sebagai presiden.

Bab keempat Menjelaskan tentang kebijakan non diskriminasi Gus Dur dan implikasinya yang berisi proses yang melatarbelakangi adanya kebijakan-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kebijakan terhadap etnis Tionghoa, peraturan-peraturan tentang asimilasi terhadap etnis Tionghoa, dan implikasinya.

Bab kelima Penutup yang berupa kesimpulan atas keseluruhan skripsi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.Media
- Bakin. 1980. *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia*. Jakarta: TP
- Barton, Greg. 2008. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: Lkis.
- Budiman, Arief, 2007. *Multikulturalisme di Cirebon*. Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI,
- Ezerman. 2003. “Catatan mengenai Kelenteng Koan Iem “Tiaok-Kak-Sie” di Cirebon”
- Horton, B Paul. 2008. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Ibad, 2010. *Leadership Secrets of Gus Dur-Gus Miek: Rahasia mengelola Potensi Diri untuk Menjadi Pemimpin yang Dicintai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Islamy, Irfan. 1993. *Kebijakan Publik I*. Jakarta: Karunia
- Iwan Satibi. TT. “Kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia I”
- Koentjaraningrat, 2007. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*,
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan
- Kusteja, Sugiri. TT. “Kedatangan Komunitas Tionghoa di Jawa Barat dan Perkembangan Kota Bandung”
- Lindsay, Jenifer dan Maya H.T.Liem (Ed), 2011. *Ahli Waris Budaya Dunia menjadi Indonesia 1950-1965*. Jakarta: Kitlv
- Lkki (Ed). 2010. *Jagadnya Gus Dur*. Yogyakarta: Kutub
- Mahfud MD. 2010. *Gus Dur (Islam, Politik, dan Kebangsaan*. Yogyakarta: Lkis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Suhada, Irwan (ED). 2010. *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: Kompas

Qurtubi, Sumanto. 2003. *Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Islam abad XV & XVI*. Yogyakarta: Inspeal Pres

Redding, Gordon. 1994. *Jiwa Kapitalisme Cina. Abdi Tandur*, Jakarta: Abdi Tandur

STAIN. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cirebon: TP

Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas*. Jakarta: Grafiti Pers

_____. 2002. *Tionghoa Negara Dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES Indonesia

_____. 2009. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta. Kompas

Triyana, Bonnie. 2011. *Eddie Lembong Mencintai Tanah Air Sepenuh Hati*. Jakarta: Kompas

Wahid, Abdul. *Bertahan di tengah krisis; Komunitas Tionghoa dan ekonomi kota Cirebon*.

Wahid, Abdurrahman. 1999. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Lkis

Muhammad, Waskito. 2010. *Cukup 1 Gus Dur Saja*. Jakarta: AL-Kautsar

Widyo, Nugrahanto. 2007. *Bertahan di Perantauan*. Bandung: Uvula Press

Yuanzhi, Kong. 2005. *Muslim Tionghoa Cheng Ho” Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Po

B. Wawancara

Dr. Satibi (Dokter Umum) Majalengka

Pak Iyan .Cirebon

Pak Mustakim (Sejarahwan) Cirebon



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pak yudi (Pegawai DEPAG) Cirebon

C. Internet

Al Zastrow, Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?. h. I, 1999,
http://books.google.co.id/books?id=SXWqqCbiVV8C&printsec=frontcover&dGus+Dur&hl=id&sa=X&ei=_IQdT7a_JoblrAeOlvTEDQ&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=Gus%20Dur&f=false

Binsar Hutabarat. *Agama, Konflik, dan Perdamaian*. h. I,
<http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/30/gus-dur-selamat-jalan-pahlawan-demokrasi-dan-pluralisme/> Diunduh pada tanggal 13/11/2011

Benyamin F Intan. *Gus Dur Pejuang Prilalisme Sejati*. h. I,
http://www.Reformedcrs.org/ind/articles/gus_dur_pejuang_pluralisme_sejati.html, Diakses 15 Desember 2011.

Zuhairi Misrawi. Prulalisme Pasca Gus Dur. h. I,
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11601&caid=1&caid=34&gid=1 Diunduh pada tanggal/15/12/2010